

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi sumber energi terbarukan menjadi perhatian utama seiring dengan berkurangnya pasokan sumber energi fosil yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan energi terbarukan gencar digalakkan untuk menciptakan sumber daya yang dapat diperbarui, salah satunya adalah panas bumi (Dirgantara, 2018). Panas Bumi atau Geotermal mengandalkan uap air atau air panas yang ada di dalam perut bumi untuk menghasilkan tenaga listrik dan termasuk ke dalam sumber energi yang ramah lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2016) menyatakan bahwa Energi panas bumi merupakan energi setempat yang tidak dapat ditransportasikan dan memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap lokasi (*site specific*). Indonesia memiliki sumber panas bumi yang sangat melimpah, tersebar sepanjang jalur sabuk gunung api mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku serta merupakan potensi panas bumi terbesar di dunia. Mengacu pada hasil penyelidikan panas bumi yang telah dilakukan oleh Badan Geologi, KESDM hingga tahun 2013 telah teridentifikasi sebanyak 312 titik potensi panas bumi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan total potensi sebesar 28.910 MW.

Pembangunan PLTP atau yang biasa disebut proyek Geotermal juga digalakkan di Gunung Talang, Sumatera Barat. Pada Bulan Oktober 2016, Menteri ESDM melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 7257 K/30/MEM/2016 tentang Pemenang Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di daerah Gunung Talang–Bukit Kili, Kabupaten Solok, menetapkan pemenang pelelangan adalah PT. Hitay Daya Energi dan PT. Dyfco Energy (Dirgantara, 2018). Rencana pembangunan ini sudah mengantongi izin pembangunan panas bumi seluas 27.000 hektar di kawasan Gunung Talang dalam jangka waktu 37 tahun.

Pengembangan proyek tersebut memicu berbagai diskursus yang diproduksi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kondisi ini juga menimbulkan paradoks dalam proses pembangunan Geotermal sendiri. Di satu sisi, Stakeholder proyek ini terus menerus memproduksi wacana bahwa pembangunan proyek Geotermal. Kadis Panas Bumi Kementerian ESDM akan tetap mendukung eksplorasi Geotermal karena dinilai memiliki banyak manfaat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Pebrianto, 2018). Pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan proyek mengelola kawasan hutan lindung, bukan dari kawasan hutan adat atau masyarakat. Masyarakat yang dekat dengan lokasi pembangunan juga dinilai mendukung pengelolaan daerahnya untuk pembangunan proyek Geotermal.

Diskursus yang diproduksi pada pihak bertentangan malah sebaliknya, Penolakan pembangunan Geotermal terjadi awalnya pada tahun 2016 melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh pemerintah Nagari. Dalam merealisasikan rencana pembangunan ini, PT Hitay Daya Energi, Pemerintah Daerah Solok, Pemerintah Nagari Batu Bajanjang beserta tokoh adat Nagari melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap rencana pembangunan Geotermal. Akan tetapi masyarakat memiliki pengetahuan tersendiri terkait lingkungan seperti terjadinya kerusakan lingkungan. Menguatnya wacana kerusakan alam dari pembangunan Geotermal mendapat dukungan pula dari LSM. Rencana pembangunan ini tidak bisa diterima oleh masyarakat setempat karena hutan yang akan dijadikan area pembangunan Geotermal tersebut adalah sumber pengairan utama yang mengalir ke kebun dan ladang milik masyarakat. Selain lahan yang akan dijadikan Geotermal tersebut merupakan hutan lindung dan ditambah lagi pemerintah juga sudah menetapkan Gunung Talang sebagai kawasan rawan bencana. Oleh karena itu masyarakat dan LSM yang tergabung ke dalam komunitas “Salingka Gunung Talang” memiliki kepentingan terhadap kelangsungan dan keasrian hutan. Melakukan protes terhadap Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Nagari Batu

Bajaranjang untuk mencabut izin terhadap PT Hitay Daya Energi Daya Energy untuk menghentikan segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan pembangunan Geotermal.

Perbedaan wacana yang diproduksi tersebut berasal dari relasi kekuasaan yang menghubungkan aktor dengan kepentingannya masing-masing. Pertentangan terjadi karena adanya regulasi penormalan yang terjadi atas dasar genealogi kuasa yang dimiliki setiap subyek atau tubuh individu. Hal ini terlihat dari wacana yang diproduksi berpihak untuk mendukung pengelolaan proyek Geotermal. relasi kuasa yang ada teraktulisasi lewat pengetahuan yang selalu memiliki efek kuasa. Wacana yang diproduksi oleh kelompok pemangku kepentingan selalu memproduksi pengetahuan bahwa proyek Geotermal mampu untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal. Pengetahuan tersebut didalamnya secara tersirat menyimpan kekuasaan bahwa tetap membangun Geotermal adalah sebuah kebenaran. Sedangkan masyarakat lokal memproduksi diskursus bahwa pembangunan akan mengancam mata pencaharian masyarakat sebagai petani, ketakutan akan terjadi perambahan hutan adat, konflik pembebasan lahan, ketakutan penjarahan oleh investor, dan lain sebagainya. Genealogi kuasa tersebut tumbuh dari tubuh setiap individu masyarakat lokal atas pengetahuan penolakan yang juga diproduksi sebagai sebuah kebenaran.

Konflik Sumber Daya Alam (SDA) pada dasarnya telah banyak dikaji melalui berbagai literatur, khususnya yang berhubungan dengan daerah konservasi. (Ina, 2011) menyatakan bahwa konflik sumber daya yang terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak disebabkan oleh perbedaan persepsi, kepentingan tata nilai, serta hak kepemilikan yang menjadi akar permasalahan utama. Berbagai upaya negosiasi yang telah dilakukan belum menemui titik terang sehingga diperlukan mediator untuk menangani kasus tersebut. Penelitian ini hanya menjelaskan sejarah konflik sumber daya alam melalui dua pihak yang bertentangan tanpa menganalisis bagaimana wacana yang diproduksi dalam sengketa tersebut.

Senada dengan Marina (Andika, 2019), menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik sumberdaya pada proyek Geotermal adalah kurangnya maksimalnya proses sosialisasi dan pengenalan panas bumi kepada masyarakat, kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, serta kurangnya pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan serta adanya intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak. Penelitian ini hanya menjelaskan faktor penyebab secara general tanpa menjelaskan bagaimana pihak yang menolak juga memproduksi pengetahuannya atas wacana yang dikonstruksi.

Menurut Foucault, kekuatan dan kuasa tersebar luas dalam relasi antar manusia. Kekuatan tersebut ditemukan dalam berbagai aspek, tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga manusia dengan lingkungan, dan lain sebagainya (Haryatmoko, 2002). Kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Dalam istilah episteme yang disebut sebagai pengetahuan otoritatif tidak lagi sebagai sebuah cara pandang dalam memisahkan yang benar dan yang salah. Episteme telah dipandang sebagai sesuatu yang praktis yang dipahami sebagai sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin atau normal dan tidak normal yang dipikirkan oleh subjek. Oleh karena itu, episteme berkembang melalui proses pergeseran dari satu bentuk ke bentuk lain secara fragmentasi pada masa tertentu. Kelanggengan episteme inilah yang berimplikasi terhadap relasi kuasa yang ada pada rezim wacana. Oleh karena itu, konflik pengelolaan sumber daya alam masih tertarik untuk diteliti dalam konteks kajian relasi kuasa. Seperti yang disampaikan Foucault, konflik juga tidak hanya tercermin dari tindakan represif pada kelompok yang bertentangan, lebih lanjut konflik juga diproduksi atas kekuasaan yang diproduksi melalui pengetahuan dari genealogi kuasa dari tubuh individu yang berkuasa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam pemanfaatan sumber panas bumi demi kebutuhan kehidupan di waktu mendatang, tentunya dalam konteks pembangunan Geotermal sangat menguntungkan Indonesia yang memiliki potensi panas bumi sebesar 29.000 MW sangat erat kaitannya dengan posisi Indonesia dalam kerangka tektonik dunia. Proyek Geotermal ini merupakan rencana jangka panjang pemerintah pusat untuk menyelamatkan Indonesia di masa mendatang dengan membangun proyek energy panas bumi yang disebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Ide tersebut merupakan landasan awal Geotermal di Gunung Talang. Namun, ketika ini direalisasikan terdapat benturan ide antara segmen komunitas menolak ide tersebut dilaksanakan di desa mereka. Pada fase ini wacana krusial terhadap konflik.

Wacana mengandung kekuasaan, peneliti berasumsi bahwasanya kekuasaan itu dibangun dengan kerangka pengetahuan dan dituangkan ke dalam wacana. Wacana diproduksi dalam relasi kuasa berdasarkan pengetahuan individu yang memiliki kepentingan tertentu. Relasi kuasa yang diproduksi tidak hanya dinilai sebagai sesuatu hal berimplikasi pada tindakan represif, tapi malah memisahkan suatu hal yang normal dan tidak normal. Relasi kuasa yang dibentuk dalam proses pengelolaan sumber daya alam melahirkan wacana yang berasal dari relasi kuasa antara dukungan dan penolakan. Adanya wacana yang beredar dalam dua kelompok yang berujung konflik, disini peneliti sangat ingin melihat bagaimana wacana itu bekerja pada relasi kuasa.

Berdasarkan pemaparan di atas, pertanyaan penelitian yang dijawab adalah: Bagaimana wacana relasi kuasa pada diskursus konflik sumber daya alam pada proyek Geotermal Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan wacana dalam pandangan Foucault sebagai bentuk kekuasaan yang memproduksi diskursus konflik sumber daya alam pada proyek Geotermal Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Kajian Foucault menangkap

kekuasaan dibangun atas dasar pengetahuan dan wacana terkait pembangunan proyek geotermal secara garis besar terdiri atas wacana manfaat dari pembangunan proyek geotermal dan dampak pembangunan proyek geotermal. Kontestasi wacana pembangunan geotermal yang menghasilkan benturan kepentingan masing-masing aktor dalam penguasaan sumber daya yang ada.

2. Mendeskripsikan relasi kuasa dari pihak yang mendukung dan pihak yang menolak pada diskursus konflik sumber daya alam pada proyek Geotermal Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara akademis: penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dibidang ilmu politik dalam kajian konflik kepentingan kekuasaan Dan proses perlawanan kelompok masyarakat dan organisasi relasi kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.
2. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah berfikir penulis di bidang kajian konflik kepentingan kekuasaan Dan proses perlawanan kelompok masyarakat dan organisasi relasi kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

